

## TINJAUAN TERKINI TENTANG KEBIJAKAN EKONOMI MONETER DAN FISKAL: IMPLIKASI DAN TANTANGAN

Mutia Khairani<sup>1</sup>, Intan Suwandi<sup>2</sup>, Novi Amalia Atami<sup>3</sup>, Pani Akhiruddin Siregar<sup>4</sup>  
[mutiakhairani2005@gmail.com](mailto:mutiakhairani2005@gmail.com)<sup>1</sup>, [intansuwandi3@gmail.com](mailto:intansuwandi3@gmail.com)<sup>2</sup>, [noviamaliatami@gmail.com](mailto:noviamaliatami@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[paniakhiruddin@umsu.ac.id](mailto:paniakhiruddin@umsu.ac.id)<sup>4</sup>

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

### ABSTRAK

Dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era globalisasi dan digitalisasi, pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara kebijakan ekonomi moneter dan fiskal menjadi kunci. Kebijakan ekonomi moneter, yang dijalankan oleh bank sentral, dan kebijakan ekonomi fiskal, yang ditetapkan oleh pemerintah, saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain dalam upaya mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kajian pustaka atau literature review sebagai pendekatan utama dalam mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik yang diteliti. Metode ini melibatkan analisis terhadap berbagai literatur, jurnal, dan sumber informasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Implikasi dari kebijakan ekonomi moneter dan fiskal yang tepat di Indonesia mencakup potensi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan stabil. Namun, tantangan seperti risiko inflasi yang berlebihan dan peningkatan defisit anggaran menuntut respons yang cepat dan terkoordinasi dari pemerintah dan otoritas ekonomi. Dengan mengatasi tantangan ini dan mengadopsi pendekatan yang holistik, Indonesia dapat memperkuat fondasi kebijakan ekonomi yang lebih solid, yang akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Kebijakan Ekonomi, Moneter Dan Fiskal, Implikasi Dan Tantangan

### ABSTRACT

*In facing challenges and exploiting opportunities in the era of globalization and digitalization, a comprehensive understanding of the relationship between monetary and fiscal economic policies is key. Monetary economic policy, implemented by the central bank, and fiscal economic policy, set by the government, are interrelated and influence each other in an effort to achieve the goal of sustainable and inclusive economic growth. This research adopts the literature review research method as the main approach in gaining an in-depth understanding of the topic under study. This method involves analysis of various literature, journals, and other sources of information relevant to the research topic. The implications of appropriate monetary and fiscal economic policies in Indonesia include the potential to stimulate stronger and more stable economic growth. However, challenges such as the risk of excessive inflation and increasing budget deficits demand rapid and coordinated responses from governments and economic authorities. By overcoming these challenges and adopting a holistic approach, Indonesia can strengthen the foundations of a more solid economic policy, which will have a positive impact on inclusive and sustainable economic growth.*

**Keywords:** Economic, Monetary And Fiscal Policy, Implications And Challenges

### PENDAHULUAN

Kebijakan ekonomi moneter dan fiskal merupakan fondasi utama yang membentuk landasan ekonomi suatu negara. Dua pendekatan ini saling terkait dan memiliki peran vital dalam mengatur stabilitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Seiring dengan berbagai perubahan yang terjadi di tingkat global, pemahaman yang mendalam tentang dinamika kebijakan ini menjadi semakin penting. Dari resesi global pada tahun 2008 hingga tantangan baru yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi, setiap fase ekonomi menuntut respons yang cermat dari pemerintah dalam mengatur kebijakan moneter dan fiskal (Pardamean, 2020).

Kebijakan ekonomi moneter di Indonesia telah menjadi fokus utama dalam upaya mencapai stabilitas ekonomi dan keuangan yang berkelanjutan. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia (BI) memainkan peran krusial dalam merancang dan melaksanakan kebijakan kebijakan yang relevan dengan kondisi ekonomi domestik dan global. Salah satu instrumen utama yang digunakan adalah penyesuaian suku bunga acuan (BI Rate), yang memengaruhi suku bunga kredit dan tabungan di pasar keuangan.

Selain itu, BI juga menggunakan operasi pasar terbuka untuk mengatur likuiditas di pasar dan mempengaruhi suku bunga jangka pendek. Pentingnya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing lainnya juga tercermin dalam intervensi valuta asing yang dilakukan oleh BI di pasar valuta asing. Tak hanya itu, kebijakan makroprudensial juga diterapkan untuk mengatur risiko sistemik di sektor keuangan, mencakup pembatasan pinjaman berlebihan dan risiko-risiko lain yang dapat mengganggu stabilitas keuangan. Dengan berbagai instrumen ini, BI berusaha untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan, menjaga inflasi pada tingkat yang dapat diterima, serta memastikan stabilitas sistem keuangan dalam jangka panjang.

Tanggapan terhadap krisis keuangan global menggarisbawahi pentingnya koordinasi antara kebijakan ekonomi moneter dan fiskal. Di berbagai belahan dunia, bank sentral telah mengadopsi kebijakan moneter yang longgar, seperti menurunkan suku bunga dan meluncurkan stimulus kuantitatif untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, reformasi fiskal dilakukan untuk memastikan keberlanjutan kebijakan dalam jangka panjang, meliputi evaluasi terhadap struktur pajak dan pengeluaran publik guna mengurangi defisit anggaran.

Selain itu, kebijakan ekonomi harus responsif terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi yang pesat. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi cara transaksi keuangan dilakukan, tetapi juga menciptakan tantangan baru dalam mengatur sektor keuangan secara menyeluruh. Misalnya, dengan adopsi pembayaran digital yang semakin luas, regulasi keuangan perlu disesuaikan untuk mengakomodasi berbagai model bisnis baru dan melindungi konsumen dari risiko keamanan dan privasi. Selain itu, keberadaan teknologi blockchain dan mata uang kripto menghadirkan pertanyaan tentang bagaimana negara-negara dapat mengatur aset digital ini untuk mencegah penyalahgunaan dan aktivitas ilegal (Triwahyuni, 2021).

Di samping itu, pemantauan ekonomi real-time menjadi semakin penting dalam mengambil keputusan kebijakan yang tepat. Dengan adanya teknologi yang memungkinkan pengumpulan dan analisis data secara cepat, negara-negara dituntut untuk memiliki infrastruktur yang memadai untuk mengumpulkan dan menganalisis data ekonomi secara real-time guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Oleh karena itu, negara-negara di seluruh dunia dituntut untuk mengadaptasi kebijakan ekonomi mereka agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan ini, sambil memastikan bahwa regulasi tetap melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era globalisasi dan digitalisasi, pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara kebijakan ekonomi moneter dan fiskal menjadi kunci. Kebijakan ekonomi moneter, yang dijalankan oleh bank sentral, dan kebijakan ekonomi fiskal, yang ditetapkan oleh pemerintah, saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain dalam upaya mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Koordinasi yang baik antara kedua jenis kebijakan ini sangat penting untuk menghindari konflik kebijakan yang dapat merugikan stabilitas ekonomi. Misalnya, ketika bank sentral menetapkan kebijakan moneter yang longgar dengan

menurunkan suku bunga, penting bagi pemerintah untuk memastikan kebijakan fiskalnya tidak kontraproduktif, seperti mengadopsi kebijakan pengeluaran yang berlebihan yang dapat memicu inflasi. Selain itu, adaptasi terhadap perubahan teknologi juga merupakan aspek penting dalam merancang kebijakan ekonomi yang responsif. Integrasi teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan analisis big data dapat membantu meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan dan pemantauan ekonomi secara real-time.

Dengan demikian, koordinasi yang baik antara kebijakan ekonomi moneter dan fiskal, bersama dengan adaptasi terhadap perubahan teknologi, akan menjadi landasan yang kuat dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di masa depan. Hanya dengan pendekatan yang terintegrasi dan responsif terhadap perubahan konteks global, negara-negara dapat mengoptimalkan peluang yang ada dan mengatasi tantangan yang dihadapi dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, menarik peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Tinjauan Terkini Tentang Kebijakan Ekonomi Moneter dan Fiskal: Implikasi dan Tantangan”.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kajian pustaka atau literature review sebagai pendekatan utama dalam mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik yang diteliti. Metode ini melibatkan analisis terhadap berbagai literatur, jurnal, dan sumber informasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dengan menggunakan kajian pustaka, penelitian ini bertujuan untuk merangkum, mengevaluasi, dan mensintesis pengetahuan yang sudah ada dalam bidang kebijakan ekonomi fiskal. Melalui tinjauan menyeluruh terhadap literatur yang relevan, penelitian ini akan memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang berbagai pendekatan, teori, dan temuan empiris yang terkait dengan kebijakan ekonomi fiskal, serta implikasi dan dampaknya dalam konteks yang lebih luas (Hadi, 2016).

Dalam melakukan penelitian ini, langkah-langkah metodologis akan mencakup identifikasi sumber-sumber literatur yang relevan, peninjauan terhadap isi literatur tersebut, analisis kritis terhadap temuan dan argumen yang disajikan, serta penyusunan sintesis yang komprehensif dari hasil kajian. Metode penelitian kajian pustaka memungkinkan peneliti untuk mengakses berbagai pandangan dan pendekatan yang berbeda dari para ahli di bidang kebijakan ekonomi fiskal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memperdalam pemahaman kita tentang kebijakan ekonomi fiskal dan menginformasikan pengembangan kebijakan yang lebih efektif di masa depan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tinjauan terkini tentang kebijakan ekonomi moneter dan fiskal menyoroti sejumlah implikasi dan tantangan yang memengaruhi perekonomian global. Dalam konteks kebijakan ekonomi moneter, penggunaan kebijakan moneter longgar oleh beberapa bank sentral bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengatasi risiko deflasi. Namun, dampak negatif yang mungkin timbul termasuk risiko inflasi yang berlebihan. Di sisi lain, kebijakan ekonomi fiskal juga menghadapi tantangan, terutama terkait dengan penyesuaian struktur pajak dan pengeluaran publik untuk memastikan keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang.

### **Implikasi Kebijakan Ekonomi Moneter Dan Fiskal Di Indonesia**

Implikasi dari kebijakan ekonomi moneter yang longgar mencakup potensi peningkatan inflasi, terutama di tengah pertumbuhan ekonomi yang sudah kuat. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan koordinasi yang lebih baik antara kebijakan ekonomi

moneter dan fiskal guna memastikan keseimbangan yang tepat antara merangsang pertumbuhan dan menjaga stabilitas harga. Selain itu, kebijakan fiskal harus diarahkan pada pengeluaran yang efisien dan efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sambil tetap memperhatikan kesenjangan sosial dan keberlanjutan fiskal (Rahadiyan & Sari, 2019).

Dalam konteks kebijakan ekonomi moneter di Indonesia, Bank Indonesia (BI) telah mengambil langkah-langkah kebijakan moneter yang longgar untuk merangsang aktivitas ekonomi dan mengatasi tekanan deflasi. Salah satu langkah yang diambil adalah menurunkan suku bunga acuan (BI Rate), yang diharapkan akan mendorong kreditur untuk meningkatkan pinjaman kepada konsumen dan pelaku usaha. Implikasi positif dari kebijakan ini termasuk merangsang investasi dan konsumsi domestik, yang berpotensi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Penurunan suku bunga juga diharapkan dapat mengurangi beban bunga bagi debitur, termasuk sektor usaha kecil dan menengah, sehingga meningkatkan daya beli masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, perlu diwaspadai risiko terkait dengan potensi peningkatan inflasi jika kebijakan moneter terlalu longgar, yang dapat mengganggu stabilitas harga dan membebani konsumen dengan biaya hidup yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Bank Indonesia perlu memantau dengan cermat perkembangan inflasi dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara merangsang pertumbuhan dan menjaga stabilitas harga (Nuryasman & Wiweko, 2001).

Di sisi lain, kebijakan ekonomi fiskal di Indonesia juga memiliki implikasi yang penting terhadap kondisi ekonomi secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk memperkuat basis pajak dengan berbagai reformasi kebijakan, seperti meningkatkan kepatuhan pajak dan memperluas basis pajak, sebagai langkah untuk meningkatkan penerimaan negara. Selain itu, upaya juga dilakukan untuk memperbaiki struktur pengeluaran publik dengan mengalokasikan dana pada sektor-sektor yang dianggap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, seperti infrastruktur dan pendidikan. Namun, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi terkait dengan peningkatan defisit anggaran dan pembiayaan yang dapat menimbulkan risiko keberlanjutan fiskal.

Kondisi ini menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan keuangan yang hati-hati dan menjaga keseimbangan antara meningkatkan investasi dan membatasi peningkatan defisit anggaran yang berlebihan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa penggunaan dana publik dilakukan dengan efisien dan efektif, dengan memprioritaskan program-program yang memiliki dampak positif yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meminimalkan risiko pemborosan atau penyalahgunaan dana. Dengan demikian, pengelolaan kebijakan ekonomi fiskal yang bijaksana dan responsif akan menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia (Abdullah, 2014).

Adanya hubungan yang erat antara kebijakan ekonomi moneter dan fiskal menuntut koordinasi yang baik antara Bank Indonesia dan pemerintah. Koordinasi yang efektif antara kedua belah pihak diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi secara keseluruhan konsisten dan saling mendukung dalam mencapai tujuan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Selain itu, adopsi teknologi dan digitalisasi dalam mengatur kebijakan ekonomi juga menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah dan bank sentral, yang memerlukan kerangka regulasi yang tepat untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dengan demikian, keberhasilan dalam mengelola kebijakan ekonomi moneter dan fiskal di Indonesia akan sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara berbagai

lembaga pemerintah, bank sentral, dan pemangku kepentingan lainnya, serta kemampuan mereka untuk menyesuaikan kebijakan sesuai dengan dinamika ekonomi global dan lokal yang terus berubah. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi, Indonesia dapat memanfaatkan peluang dan mengatasi hambatan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

### **Tantangan Kebijakan Ekonomi Moneter Dan Fiskal Di Indonesia**

Tantangan utama yang dihadapi dalam mengatur kebijakan ekonomi moneter dan fiskal adalah ketidakpastian ekonomi global yang terus berubah dan dampak dari perubahan teknologi dan digitalisasi. Pemerintah dan bank sentral perlu secara aktif mengantisipasi dan menyesuaikan kebijakan mereka sesuai dengan perubahan ini untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Langkah-langkah ini termasuk meningkatkan koordinasi antara kebijakan ekonomi moneter dan fiskal, memperkuat regulasi keuangan terkait dengan teknologi, serta memastikan bahwa kebijakan ekonomi fiskal didukung oleh struktur pajak yang adil dan efisien. Dengan demikian, peningkatan kerjasama dan adaptasi yang tepat terhadap perubahan eksternal akan menjadi kunci dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dan memanfaatkan peluang dalam mengatur kebijakan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (Azwar, 2016).

Tantangan dalam kebijakan ekonomi moneter dan fiskal di Indonesia mencakup berbagai aspek yang perlu diatasi untuk mencapai stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Pertama, dalam konteks kebijakan ekonomi moneter, Bank Indonesia (BI) dihadapkan pada tantangan dalam mengelola suku bunga acuan (BI Rate) untuk mengendalikan inflasi dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Penyesuaian suku bunga harus dilakukan dengan hati-hati untuk meminimalkan risiko kenaikan inflasi yang berlebihan sambil mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat. Selain itu, BI juga harus memperhatikan dampak kebijakan moneter terhadap stabilitas nilai tukar rupiah dan risiko keuangan lainnya (Fahrika & Roy, 2020).

Kedua, dalam kebijakan ekonomi fiskal, pemerintah dihadapkan pada tantangan dalam menjaga keseimbangan antara meningkatkan belanja publik untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan memastikan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Peningkatan defisit anggaran dapat menimbulkan risiko keuangan yang serius jika tidak diimbangi dengan upaya untuk meningkatkan pendapatan atau mengelola belanja secara efisien. Selain itu, tantangan lain termasuk memperbaiki efisiensi pengeluaran publik, meningkatkan kualitas infrastruktur, dan mengurangi kesenjangan pendapatan serta kesenjangan antarwilayah.

Ketiga, kedua kebijakan ekonomi tersebut juga dihadapkan pada tantangan terkait dengan dinamika ekonomi global yang tidak pasti, seperti perubahan suku bunga global, ketidakpastian perdagangan internasional, dan gejolak pasar keuangan global. Hal ini menuntut respons yang cepat dan tepat dari otoritas ekonomi Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan eksternal yang cepat.

Keempat, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan struktural, seperti ketimpangan antara sektor perkotaan dan pedesaan, serta masalah ketenagakerjaan dan kemiskinan. Kebijakan ekonomi moneter dan fiskal perlu memperhatikan tantangan struktural ini untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan mengadopsi kebijakan yang dapat memperkuat sektor-sektor ekonomi yang berpotensi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk membangun fondasi kebijakan ekonomi yang lebih solid dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Melalui koordinasi yang baik antara kebijakan ekonomi moneter dan fiskal, pemerintah dapat menciptakan lingkungan makroekonomi yang stabil dan mendukung investasi yang berkelanjutan. Dengan memprioritaskan efisiensi penggunaan dana publik, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk mendukung pembangunan infrastruktur berkualitas dan program-program pembangunan yang berdampak luas. Selain itu, dengan mengadopsi kebijakan inklusif, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan akses terhadap kesempatan ekonomi, sehingga memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh semua lapisan masyarakat (Meiyenti et al., 2023).

## **KESIMPULAN**

Secara keseluruhan, tinjauan terhadap kebijakan ekonomi moneter dan fiskal menyoroti pentingnya koordinasi yang baik antara berbagai instrumen kebijakan untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil. Implikasi dari kebijakan ekonomi moneter yang longgar dan kebijakan fiskal yang terencana dengan baik dapat merangsang aktivitas ekonomi dan memperkuat fondasi ekonomi negara. Namun, tantangan seperti risiko inflasi yang berlebihan, peningkatan defisit anggaran, dan ketidakpastian ekonomi global menekankan perlunya respons yang tepat dan terkoordinasi dari pemerintah dan otoritas ekonomi. Dalam menghadapi dinamika kompleks ini, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang holistik, termasuk reformasi struktural yang berkelanjutan dalam pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter, serta memperkuat daya tahan ekonomi terhadap ketidakpastian eksternal. Dengan demikian, upaya bersama dalam mengatasi tantangan ini akan memungkinkan Indonesia untuk membangun fondasi kebijakan ekonomi yang lebih kokoh dan mempercepat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, H. (2014). Realokasi Kebijakan Fiskal: Implikasi Peningkatan Human Capital dan Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Bina Praja*, 06(02), 117–128. <https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.117-128>
- Azwar, A. (2016). Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 20(2), 149–167. <https://doi.org/10.31685/kek.v20i2.186>
- Fahrika, a I., & Roy, J. (2020). Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh. *Inovasi*, 16(2), 206–213.
- Hadi. (2016). Pemeriksaan Keabsahan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 74–79.
- Meiyenti, I., Agustina, I., Primadhany, E. F., Tumija, & Nalien, E. M. (2023). Menganalisis Kebijakan Fiskal dan Moneter: Dampaknya terhadap Stabilitas Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science*, 1(03), 186–195. <https://doi.org/10.58812/jekws.v1i03.503>
- Nuryasman, M. N., & Wiweko, H. (2001). Deregulasi Di Indonesia Perkembangan dan Dampaknya Terhadap Perbankan. *Jurnal Ekonomi*, 6(1), 35–52.
- Pardamean, A. T. (2020). Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia. *Quantitative Economics Journal*, 2(3), 126–136. <https://doi.org/10.24114/qej.v2i3.17434>
- Rahadiyan, I., & Sari, A. R. (2019). Peluang Dan Tantangan Implementasi Fintech Peer ToPeer Lending Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Defendonesia*, 4(1), 18–28. <https://doi.org/10.54755/defendonesia.v4i1.79>
- Saragih, J. P. (2015). Bauran Kebijakan Moneter-Fiskal Terhadap Pencapaian Target Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Kajian*, 20(2), 163–182.
- Triwahyuni. (2021). Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 6(2), 199–210.